

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan regulasi yang menyeluruh mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk aspek tata kelola serta mekanisme pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Keberadaan UU ini menjadi dasar yuridis bagi upaya peningkatan daya saing nasional dalam merespons tantangan global di berbagai sektor. Secara tegas, peraturan tersebut menempatkan sistem tata kelola keuangan PTN sebagai bagian integral dari otonomi institusi, sehingga setiap PTN memiliki pedoman yang jelas untuk mengatur sekaligus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya finansialnya (Republik Indonesia, 2012).

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia didasarkan pada tiga model utama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pertama, PTN yang menggunakan pola pengelolaan keuangan negara secara umum atau dikenal dengan PTN Satuan Kerja (Satker), di mana sumber dana dikelola melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kedua, PTN dengan status Badan Layanan Umum (PTN-BLU), yang memperoleh fleksibilitas menengah dalam mengelola anggaran serta penggunaan dana. Ketiga, PTN Berbadan Hukum (PTNBH), yang diberikan kewenangan otonomi penuh dan tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengelola sumber daya keuangan, sehingga sering dipandang sebagai bentuk PTN dengan kapasitas manajerial keuangan paling kuat (Pemerintah Indonesia, 2014).

Meningkatnya ekspektasi publik terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip *good governance* menuntut perguruan tinggi untuk secara konsisten menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dalam konteks ini memegang peranan penting karena menjadi dasar dalam penyajian laporan keuangan yang transparan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara teoretis, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban suatu institusi untuk memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan organisasi. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan secara berkala sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku (Mardiasmo, 2018).

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Laporan keuangan tersebut harus mencerminkan karakteristik kualitatif, yaitu mudah dipahami, relevan, andal, serta dapat diperbandingkan. Tujuan utama penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan terkait posisi keuangan dan aktivitas transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode akuntansi. Informasi ini digunakan sebagai dasar dalam membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, maupun pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja entitas (Republik Indonesia, 2012).

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor kunci dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengembangkan serta mengoptimalkan teknologi informasi guna memperkuat pengelolaan keuangan dan penyampaian informasi keuangan

kepada publik. Penerapan teknologi informasi yang tepat dan terintegrasi diharapkan mampu mempercepat proses pencatatan transaksi, mengurangi potensi kesalahan, serta menghasilkan data yang akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, keberadaan sistem berbasis teknologi informasi berperan penting dalam mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Republik Indonesia, 2005).

Menurut Mardiasmo (2018), kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan kualitas pengelolaan keuangan, mulai dari proses penatausahaan hingga tahap pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan. Kompetensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan teknis, tetapi juga mencakup keterampilan praktis dan sikap profesional yang mendukung efektivitas fungsi akuntansi. SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, memahami regulasi keuangan, serta rutin mengikuti pelatihan yang relevan akan lebih mampu menyusun laporan keuangan yang tepat waktu, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dapat dipandang sebagai strategi utama dalam menjamin kualitas sekaligus efisiensi pengelolaan keuangan di perguruan tinggi.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, praktik akuntabilitas dalam pelaporan keuangan di perguruan tinggi negeri masih menghadapi sejumlah kendala. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010 mengungkap adanya berbagai permasalahan serius, seperti pungutan dari masyarakat yang tidak dilaporkan, opini audit disclaimer dengan nilai temuan mencapai Rp763,12 miliar, penggunaan rekening di luar mekanisme resmi yang mengaburkan alokasi dana, serta pengelolaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Fakta tersebut menegaskan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan perguruan tinggi belum sepenuhnya optimal dan masih membutuhkan perbaikan signifikan (BPK RI, 2011).

Salah satu kasus yang mencerminkan lemahnya pengelolaan keuangan perguruan tinggi terjadi di Universitas Andalas (Unand) pada tahun 2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan sejumlah permasalahan, antara lain pengelolaan saldo dan penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan yang tidak tertib, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang tidak melalui mekanisme Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), serta penerimaan dari fasilitas mess di Jakarta yang tidak memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem keuangan belum berjalan optimal, serta menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Lebih jauh, kualitas laporan keuangan diduga turut dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya minimnya tenaga dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan perguruan tinggi (BPK RI, 2019).

Universitas Andalas (Unand) memperoleh status sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) setelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia pada 31 Agustus 2021. Dengan status tersebut, Unand memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengatur urusan internal, termasuk pada aspek keuangan, kepegawaian, serta pengelolaan sumber daya lainnya. Pemberian kewenangan ini dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat lebih responsif dalam proses pengambilan keputusan strategis, sehingga mampu mewujudkan visi menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sekaligus berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Republik Indonesia, 2021).

Konteks serupa juga dialami oleh Universitas Hasanuddin (Unhas), yang sebelumnya telah lebih dahulu ditetapkan sebagai PTNBH melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014. Status PTNBH memberikan ruang otonomi yang besar bagi Unhas dalam mengelola keuangan, aset, serta tata kelola kelembagaannya. Dengan adanya otonomi tersebut,

perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, studi mengenai tata kelola keuangan dan akuntabilitas di Unhas sebagai PTNBH menjadi relevan, terutama jika dikaitkan dengan perbandingan pengalaman perguruan tinggi lain yang juga berstatus PTNBH seperti Unand.

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan merupakan faktor strategis yang menentukan keberlangsungan dan daya saing perguruan tinggi. Universitas Hasanuddin, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di kawasan Indonesia Timur, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya keuangannya dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, kompleksitas pengelolaan keuangan perguruan tinggi semakin meningkat, sehingga menuntut penerapan sistem yang adaptif, inovatif, dan selaras dengan prinsip *good governance* serta praktik terbaik dalam tata kelola keuangan modern (Mardiasmo, 2018).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, efisiensi pengelolaan keuangan menjadi prasyarat penting bagi keberlangsungan dan daya saing perguruan tinggi, termasuk Universitas Hasanuddin sebagai PTNBH. Upaya mewujudkan efisiensi tersebut tidak hanya bergantung pada penerapan sistem dan mekanisme teknis, tetapi juga ditentukan oleh faktor strategis, terutama kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. SDM yang kompeten dan profesional berperan krusial dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan yang transparan dan akuntabel. Pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip *good governance* menjadi fondasi utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa setiap proses berjalan secara efisien. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan regulasi, keterampilan teknis dalam bidang akuntansi dan penganggaran, serta kemampuan

analitis dalam menyusun dan mengevaluasi laporan keuangan secara tepat, relevan, dan andal (Mardiasmo, 2018).

Di samping faktor kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan pada era digital saat ini. Sistem informasi keuangan yang terintegrasi memberikan berbagai manfaat strategis, antara lain mempercepat proses pencatatan transaksi, mengurangi potensi kesalahan manusia, serta menghasilkan data yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi digital, seperti *enterprise resource planning* (ERP), perangkat lunak akuntansi berbasis modern, hingga sistem pembayaran elektronik, telah mengubah paradigma pengelolaan keuangan di lingkungan perguruan tinggi. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan proses keuangan berjalan lebih transparan, efisien, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tanpa dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, pengelolaan keuangan cenderung berlangsung lambat, tidak efisien, dan berisiko menimbulkan kesalahan administratif maupun peluang terjadinya penyimpangan (PP No. 56 Tahun 2005).

Namun demikian, efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan kebijakan institusi yang jelas, konsisten, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Kebijakan berperan sebagai payung hukum sekaligus pedoman operasional yang mengatur tata kelola keuangan secara sehat. Menurut Dunn (2018), kebijakan publik pada dasarnya merupakan instrumen penting untuk mengarahkan tindakan organisasi agar selaras dengan tujuan strategis. Dalam konteks perguruan tinggi, kebijakan yang dirancang dengan baik mampu menciptakan sinergi antara kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga mendorong tercapainya efisiensi.

Sebaliknya, kebijakan yang lemah atau inkonsisten berpotensi menghambat pencapaian tujuan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Grindle, 1997). Lebih lanjut, kebijakan dapat menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kerja, sekaligus menyediakan mekanisme pengawasan dan evaluasi internal yang merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya efisiensi (LAN, 2007). Dengan demikian, keberadaan kebijakan institusional yang kuat menjadi fondasi utama dalam mengintegrasikan SDM yang kompeten dan teknologi informasi yang mutakhir ke dalam praktik pengelolaan keuangan di perguruan tinggi.

Dalam konteks Universitas Hasanuddin, transformasi pengelolaan keuangan menjadi suatu keharusan seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi publik, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana yang bersumber dari negara maupun masyarakat. Tantangan tersebut menuntut institusi untuk tidak hanya mengandalkan kapabilitas internal, tetapi juga merumuskan kebijakan keuangan yang responsif terhadap dinamika lingkungan strategis. Hal ini sejalan dengan pandangan Brinkerhoff & Morgan (2009) yang menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan perlu dibangun melalui kombinasi kompetensi individu, struktur organisasi, dan kerangka kebijakan yang mendukung.

Kebijakan keuangan yang dirumuskan harus mampu mengakomodasi pengelolaan berbagai sumber dana, seperti dana pendidikan, dana riset, dan dana pembangunan infrastruktur, agar selaras dengan prioritas serta kebutuhan strategis universitas. Keberadaan kebijakan yang adaptif akan memberikan kepastian arah bagi implementasi sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi sekaligus memastikan bahwa kompetensi SDM dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik (UNDP, 1997).

Sejumlah penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa sumber daya manusia (SDM) dan teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi kerja, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Hengki Primayana, (2016), misalnya, menemukan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan pada perguruan tinggi swasta. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kompetensi individu dalam penguasaan regulasi, keterampilan teknis akuntansi, serta kemampuan analitis menjadi faktor penting dalam mendorong tata kelola keuangan yang lebih efisien.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Aprilia et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang cepat, akurat, dan transparan.

Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut belum secara eksplisit menyoroti peran kebijakan institusional sebagai variabel moderasi, padahal kebijakan berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam tata kelola keuangan. Sejalan dengan pandangan Grindle (1997), kebijakan publik memiliki peran fundamental dalam membentuk perilaku organisasi, sehingga dapat memperkuat atau justru melemahkan efektivitas sistem yang ada. Oleh karena itu, kajian mengenai efisiensi pengelolaan keuangan di perguruan tinggi perlu memasukkan dimensi kebijakan institusional untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan.

Efisiensi pengelolaan keuangan merupakan aspek krusial bagi keberlangsungan dan kemajuan institusi pendidikan tinggi. Universitas Hasanuddin, sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia Timur sekaligus berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

(PTNBH), memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangannya berlangsung secara efisien, transparan, dan akuntabel. Status PTNBH memberikan otonomi yang luas, termasuk dalam aspek keuangan, namun di sisi lain juga menuntut adanya tata kelola yang adaptif dan selaras dengan praktik terbaik manajemen keuangan modern.

Efisiensi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh aspek strategis yang mencakup kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi. SDM yang kompeten dalam regulasi, akuntansi, dan analisis keuangan memainkan peran sentral dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan mendorong terciptanya efisiensi. Di sisi lain, sistem informasi keuangan berbasis teknologi digital, seperti enterprise resource planning (ERP) dan perangkat lunak akuntansi modern, mampu mempercepat pencatatan, meminimalkan kesalahan, serta menyediakan data akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Namun, optimalisasi kedua aspek tersebut tidak akan tercapai tanpa dukungan kebijakan institusi yang jelas, konsisten, dan responsif. Kebijakan berfungsi sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan kompetensi SDM dan teknologi dalam satu kerangka kerja yang terarah, sekaligus menetapkan standar operasional prosedur (SOP), mekanisme pengawasan, dan evaluasi internal. Dalam konteks Universitas Hasanuddin, transformasi kebijakan keuangan menjadi sangat penting mengingat semakin tingginya tuntutan transparansi publik, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas penggunaan dana dari negara maupun masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu, seperti Hengki Primayana, (2016) serta Aprilia et al. (2023), telah menegaskan pentingnya kualitas SDM dan penerapan teknologi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Akan tetapi, dimensi kebijakan institusional belum secara komprehensif ditelaah sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Padahal, sebagaimana ditegaskan Grindle (1997),

kebijakan publik merupakan faktor kunci dalam membentuk perilaku organisasi dan memastikan keberhasilan implementasi tata kelola keuangan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap efisiensi pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin, serta menganalisis sejauh mana kebijakan institusi berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian manajemen keuangan di lingkungan pendidikan tinggi, sekaligus kontribusi praktis bagi Universitas Hasanuddin dalam merumuskan strategi dan kebijakan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin?
3. Apakah kebijakan memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan efisiensi pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin?
4. Apakah kebijakan memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan efisiensi pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efisiensi pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin.

2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efisiensi pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin.
3. Untuk menguji peran kebijakan dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efisiensi pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin.
4. Untuk menguji peran kebijakan dalam memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efisiensi pengelolaan keuangan di Universitas Hasanuddin.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia.
2. Praktis: Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan di Universitas Hasanuddin dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai deskripsi secara menyeluruh dalam penelitian ini, secara sistematis tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini tinjauan pustaka berisikan uraian tentang Pengaruh SDM dan Teknologi Terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan di Moderasi oleh Kebijakan di Universitas Hasanuddin serta didukung dengan penelitian terdahulu.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Dalam kerangka konseptual dan hipotesis berisi tentang gambaran terhadap kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang akan diuji.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan yang dilakukan dalam menuliskan penelitian tentang rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi, sampel dan Teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional serta teknik analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Agency Theory

Agency Theory atau teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (pemberi amanah) dengan agent (penerima amanah). Dalam hubungan ini, principal memiliki kepentingan agar sumber daya dikelola secara optimal, sedangkan agent ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan tersebut. Namun, karena perbedaan kepentingan dan adanya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*), sering muncul potensi konflik yang memunculkan biaya keagenan (*agency costs*). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian, insentif, serta kebijakan yang mampu menyelaraskan tujuan kedua belah pihak (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976).

Anthony & Govindarajan (2007) menekankan bahwa teori keagenan tidak hanya menyoroti adanya perbedaan kepentingan, tetapi juga menjelaskan perlunya sistem pengendalian manajemen untuk memastikan agent bertindak sesuai dengan harapan principal. Mekanisme pengendalian tersebut dapat berupa kontrak, aturan formal, maupun kebijakan organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Scott (2015), yang menyatakan bahwa kontrak keagenan dirancang untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan tujuan organisasi tercapai melalui insentif maupun pengawasan yang efektif.

Hill & Jones (1992) bahkan memperluas cakupan *Agency Theory* dengan menekankan bahwa konflik kepentingan tidak hanya terjadi dalam hubungan keuangan, tetapi juga dalam konteks perilaku manajerial. Agen sering kali memiliki kecenderungan bertindak oportunistik, misalnya

memaksimalkan kepentingan pribadi di atas kepentingan organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun mekanisme kontrol yang memadai, baik melalui kebijakan, penggunaan teknologi informasi, maupun sistem insentif, untuk menjaga keseimbangan hubungan antara principal dan agent.

Dalam konteks perguruan tinggi negeri seperti Universitas Hasanuddin, teori keagenan menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan dapat berjalan efisien. Pemerintah dan pimpinan universitas bertindak sebagai principal yang mengharapkan pengelolaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan hemat. Di sisi lain, aparatur pengelola keuangan bertindak sebagai agent yang diberi mandat menjalankan kebijakan tersebut. Kompetensi sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi berperan penting untuk meminimalisasi asimetri informasi dan potensi penyimpangan, sementara kebijakan pengelolaan keuangan berfungsi sebagai instrumen moderasi yang memastikan agent bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Dengan demikian, Agency Theory memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menelaah hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

2.1.2 Control Theory

Control Theory atau teori pengendalian merupakan salah satu pendekatan manajemen yang menekankan pentingnya sistem pengawasan dan pengendalian dalam memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Ouchi (1979), pengendalian dalam organisasi berfungsi untuk menyelaraskan perilaku anggota organisasi dengan kepentingan manajerial melalui mekanisme formal maupun informal. Hal ini dilakukan agar setiap individu dalam organisasi tidak hanya berfokus pada tujuan pribadinya, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan kolektif.

Dalam literatur manajemen, Anthony dan Govindarajan (2007) menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen terdiri atas prosedur,

aturan, dan mekanisme monitoring yang digunakan untuk memastikan sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya pengendalian, organisasi berisiko mengalami pemborosan, ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran, serta rendahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, pengendalian dipandang sebagai instrumen penting dalam mengelola potensi deviasi yang mungkin timbul dalam pengelolaan keuangan.

Pengendalian internal memiliki peran sentral dalam sektor publik maupun pendidikan tinggi. COSO (2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan seluruh personel organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terkait efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Melalui sistem pengendalian internal, organisasi mampu meminimalkan risiko kecurangan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menjamin kualitas laporan keuangan.

Dalam konteks Universitas Hasanuddin, *Control Theory* memberikan dasar konseptual mengenai perlunya mekanisme pengendalian internal yang kuat dalam pengelolaan keuangan. Aparatur yang memiliki kewenangan sebagai pengelola anggaran perlu diawasi melalui regulasi, standar operasional prosedur, audit internal, serta penggunaan teknologi informasi. Dengan adanya pengendalian yang efektif, efisiensi dapat tercapai karena sumber daya keuangan digunakan secara optimal dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

2.1.3 Resource-Based View (RBV)

Resource-Based View (RBV) merupakan salah satu teori manajemen strategis yang menekankan bahwa sumber daya internal organisasi adalah faktor utama dalam mencapai keunggulan bersaing dan kinerja yang berkelanjutan. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Wernerfelt (1984) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Barney (1991). Menurut RBV, organisasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif

ketika mereka memiliki sumber daya yang bersifat valuable (bernilai), rare (langka), inimitable (sulit ditiru), dan non-substitutable (tidak tergantikan) atau yang dikenal dengan kerangka VRIN.

Dalam konteks manajemen keuangan di perguruan tinggi, RBV memberikan dasar pemikiran bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset strategis yang tidak mudah digantikan. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh pegawai dalam mengelola keuangan. SDM yang kompeten mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, mengendalikan penggunaan anggaran, serta mendukung efisiensi pengelolaan dana pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan pandangan Grant (1991) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas merupakan pondasi penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Lebih jauh, RBV juga relevan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi. Teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi juga dapat menjadi keunggulan kompetitif apabila dikelola dengan baik. Sistem informasi keuangan yang efektif, misalnya, memungkinkan universitas mengurangi asimetri informasi, mempercepat proses transaksi, meningkatkan akurasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Jika dipadukan dengan kompetensi SDM yang memadai, teknologi ini akan menjadi sumber daya strategis yang mendukung efisiensi pengelolaan keuangan.

Dalam praktiknya, Universitas Hasanuddin sebagai institusi pendidikan tinggi negeri harus mampu mengoptimalkan potensi sumber daya internal, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan. Aparatur yang berkompeten dan berintegritas dapat dianggap sebagai aset strategis, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi menjadi pendukung utama untuk memperkuat tata kelola keuangan. Dengan demikian, RBV menjelaskan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan tidak hanya

bergantung pada regulasi eksternal, tetapi terutama pada bagaimana organisasi mampu mengembangkan dan mengelola sumber daya internalnya.

Implikasi dari teori ini dalam penelitian adalah bahwa kompetensi SDM dianggap sebagai variabel utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat diposisikan sebagai faktor pendukung yang memperkuat hubungan tersebut. Dengan adanya kebijakan yang jelas sebagai variabel moderasi, Universitas Hasanuddin memiliki peluang lebih besar untuk mengoptimalkan sumber daya internalnya guna mencapai tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

2.1.4 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dalam menerima dan menggunakan teknologi. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Davis (1989), yang mengemukakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu Perceived Usefulness (PU) atau persepsi kemanfaatan, dan Perceived Ease of Use (PEOU) atau persepsi kemudahan penggunaan. Semakin tinggi tingkat kemanfaatan dan kemudahan yang dirasakan, semakin besar kemungkinan seseorang akan menerima dan menggunakan teknologi tersebut.

Menurut Venkatesh & Davis (2000), TAM tidak hanya menjelaskan faktor teknis, tetapi juga aspek psikologis dan perilaku yang mendasari keputusan seseorang untuk memanfaatkan teknologi. Dengan demikian, TAM memberikan kerangka konseptual untuk memahami mengapa sebagian individu cepat mengadopsi sistem informasi, sementara yang lain enggan melakukannya. Dalam organisasi, keberhasilan implementasi teknologi informasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada sejauh mana SDM menganggap teknologi tersebut bermanfaat dan mudah digunakan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan di perguruan tinggi, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan efisiensi. Sistem keuangan berbasis teknologi, misalnya aplikasi akuntansi atau sistem informasi manajemen keuangan, memungkinkan pencatatan transaksi lebih cepat, akurat, dan transparan. Jika aparatur menganggap sistem ini bermanfaat (PU) dalam mempercepat penyusunan laporan, sekaligus mudah digunakan (PEOU) tanpa memerlukan keterampilan teknis yang rumit, maka tingkat penerimaan akan meningkat. Peningkatan penerimaan ini berimplikasi langsung pada efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Selain itu, kebijakan organisasi juga memainkan peran dalam memperkuat adopsi teknologi. Menurut Legris et al. (2003), implementasi teknologi akan lebih efektif apabila didukung oleh pelatihan, insentif, dan kebijakan yang jelas dari pimpinan organisasi. Dalam kasus Universitas Hasanuddin, dukungan kebijakan universitas dalam bentuk pedoman penggunaan sistem keuangan digital dapat mendorong aparatur untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Dengan cara ini, TAM memberikan kerangka teoritis yang menjelaskan hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi SDM, dan efisiensi pengelolaan keuangan.

2.1.5 Good Governance Theory

Good Governance Theory merupakan teori yang menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang baik dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Konsep ini banyak berkembang dalam ranah administrasi publik dan manajemen pemerintahan sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang lebih terbuka dan akuntabel (World Bank, 1992). Dalam perspektif teori tata kelola, organisasi publik tidak hanya dituntut untuk mencapai tujuan, tetapi juga untuk melakukannya

secara bertanggung jawab, transparan, serta sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan.

Menurut UNDP (1997), good governance merupakan mekanisme, proses, dan institusi yang digunakan dalam mengarahkan dan mengelola urusan publik dengan cara yang mendorong keterlibatan masyarakat, menegakkan hukum, serta memastikan keadilan dan efisiensi. Dalam praktiknya, tata kelola yang baik menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat dipercaya, karena semua keputusan dan penggunaan anggaran dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, good governance menempatkan efisiensi pengelolaan sumber daya sebagai salah satu indikator utama keberhasilan sebuah organisasi publik.

Dalam konteks pengelolaan keuangan perguruan tinggi, good governance sangat relevan karena universitas sebagai institusi publik mengelola anggaran yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Menurut Sedarmayanti (2017), penerapan prinsip-prinsip good governance dalam lembaga pendidikan tinggi mencakup transparansi dalam penyusunan anggaran, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta partisipasi civitas akademika dalam proses perencanaan dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengharuskan setiap institusi publik mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Bagi Universitas Hasanuddin, penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan dapat dicapai melalui kompetensi SDM yang mumpuni, pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung keterbukaan data, serta kebijakan internal yang menjamin keadilan dan efisiensi. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan konseptual yang memperkuat hubungan antar variabel penelitian, di mana kompetensi SDM dan teknologi informasi tidak hanya berdampak pada efisiensi keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen universitas terhadap tata kelola yang baik.

2.1.6 Konsep Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.6.1 Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan konsep yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan tugas secara efektif. Spencer & Spencer (1993) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari perilaku individu, yang berhubungan dengan efektivitas kinerja dalam suatu pekerjaan. Karakteristik tersebut mencakup motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, serta keterampilan yang dapat diobservasi dan diukur. Dengan demikian, kompetensi dipandang sebagai fondasi utama yang memengaruhi kualitas kinerja pegawai.

Boyatzis (1982) memandang kompetensi sebagai kapasitas yang ada pada seseorang yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dalam suatu organisasi. Kapasitas ini tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional, kemampuan interpersonal, serta motivasi yang mendukung kinerja yang unggul. Perspektif ini menekankan bahwa kompetensi adalah kombinasi antara keahlian teknis dan kemampuan nonteknis yang saling melengkapi.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa kompetensi aparatur mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan. UU ASN menekankan pentingnya kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang harus dimiliki oleh setiap aparatur negara sebagai syarat dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing.

Dengan menggabungkan pandangan para ahli dan regulasi nasional, kompetensi sumber daya manusia dapat dipahami sebagai seperangkat kapasitas yang bersifat multidimensional dan integral.

Kompetensi tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga oleh motivasi, nilai, serta perilaku yang konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan di lingkungan perguruan tinggi, kompetensi SDM yang memadai menjadi faktor penentu tercapainya efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola yang baik.

2.1.6.2 Dimensi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia tidak hanya dipahami sebagai sebuah konsep tunggal, tetapi terdiri dari beberapa dimensi utama yang saling melengkapi. Menurut Spencer dan Spencer (1993), dimensi kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang menjadi indikator utama efektivitas kinerja. Ketiga dimensi ini menjelaskan bagaimana individu mampu melaksanakan tugasnya secara optimal dalam organisasi.

1. **Pengetahuan (Knowledge)** Pengetahuan merujuk pada informasi, pemahaman, serta wawasan yang dimiliki seseorang terkait dengan bidang pekerjaan tertentu. Menurut Boyatzis (1982), pengetahuan merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan individu untuk memahami konteks pekerjaan, memecahkan masalah, serta membuat keputusan yang tepat. Dalam pengelolaan keuangan, pengetahuan mencakup pemahaman regulasi, prosedur administrasi, hingga prinsip-prinsip akuntansi yang relevan.
2. **Keterampilan (Skills)** Keterampilan adalah kemampuan praktis yang digunakan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam bentuk tindakan nyata. Spencer dan Spencer (1993) menjelaskan bahwa keterampilan dapat berbentuk teknis maupun nonteknis, seperti penggunaan perangkat lunak akuntansi, analisis data, atau keterampilan komunikasi interpersonal. Keterampilan yang memadai memungkinkan pegawai bekerja lebih efisien, produktif, dan sesuai standar yang ditetapkan organisasi.

3. Sikap Kerja (Work Attitude) Sikap kerja mencakup motivasi, nilai, serta perilaku individu dalam melaksanakan tugas. UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 menekankan bahwa perilaku aparatur harus mencerminkan profesionalisme, integritas, dan orientasi pada pelayanan publik. Sikap kerja yang positif seperti disiplin, tanggung jawab, serta orientasi pada kualitas akan mendukung tercapainya kinerja organisasi yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, dimensi kompetensi sumber daya manusia memberikan kerangka yang komprehensif untuk menilai dan mengembangkan kapasitas pegawai. Kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang baik akan menghasilkan kinerja optimal, khususnya dalam pengelolaan keuangan di perguruan tinggi yang menuntut akuntabilitas dan transparansi tinggi.

2.1.6.3 Peran Kompetensi dalam Pengelolaan Keuangan

Kompetensi sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan yang efektif di lingkungan organisasi, khususnya pada sektor publik dan perguruan tinggi. Kompetensi yang baik tidak hanya menentukan kemampuan teknis aparatur, tetapi juga memengaruhi akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Adapun peran kompetensi dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut:

1. Meningkatkan Akurasi

Kompetensi yang memadai memungkinkan aparatur memahami prosedur keuangan secara detail dan tepat. Spencer dan Spencer (1993) menegaskan bahwa kompetensi terkait pengetahuan dan keterampilan merupakan faktor kunci yang memastikan pegawai dapat melakukan pencatatan, perhitungan, serta pelaporan keuangan tanpa kesalahan signifikan. Akurasi dalam pengelolaan keuangan menjadi

dasar dalam menghasilkan laporan yang dapat dipercaya dan sesuai dengan standar akuntansi.

2. Meningkatkan Efisiensi

Aparatur yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai mampu melaksanakan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan menggunakan sumber daya secara optimal. Boyatzis (1982) menjelaskan bahwa kompetensi yang baik berhubungan langsung dengan peningkatan produktivitas kerja. Dalam konteks keuangan, efisiensi ditunjukkan melalui pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, minimnya pemborosan, serta penggunaan teknologi untuk mempercepat proses administrasi keuangan.

3. Meningkatkan Akuntabilitas

Akuntabilitas tercermin dari kemampuan pegawai untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kompetensi tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga sikap profesional dan integritas dalam melaksanakan tugas. Kompetensi dalam dimensi sikap kerja, seperti disiplin dan tanggung jawab, menjamin bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.

Dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia berperan sebagai fondasi utama dalam mendukung pengelolaan keuangan yang berkualitas. Melalui akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas yang ditopang oleh kompetensi yang baik, organisasi dapat mencapai efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan sekaligus memenuhi tuntutan transparansi publik.

2.1.7 Konsep Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.7.1 Teknologi Informasi (TI) dalam manajemen keuangan

Teknologi informasi (TI) merupakan seperangkat alat, sistem, serta metode yang digunakan untuk mengelola, memproses, menyimpan, dan menyampaikan informasi secara efektif. Dalam konteks manajemen, TI tidak hanya dipandang sebagai sarana teknis, melainkan juga sebagai instrumen strategis yang mendukung pengambilan keputusan. Menurut Laudon & Laudon (2020), teknologi informasi adalah kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta basis data yang digunakan organisasi untuk mengelola informasi, meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam lingkup manajemen keuangan, TI berperan penting dalam mempermudah pencatatan, pengolahan, dan pelaporan transaksi keuangan. Romney & Steinbart (2018) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan, andal, serta tepat waktu. Hal ini membantu organisasi dalam meningkatkan akurasi laporan keuangan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan risiko kesalahan maupun kecurangan.

Selain itu, TI dalam manajemen keuangan juga dipahami sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Bodnar & Hopwood (2013), penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi modern menciptakan sistem yang terintegrasi, sehingga seluruh transaksi dapat ditelusuri dengan jelas dan diaudit secara efisien. Hal ini menjadikan TI bukan hanya sebagai alat bantu teknis, tetapi juga bagian integral dari tata kelola keuangan yang baik.

Dengan demikian, definisi teknologi informasi dalam manajemen keuangan mencakup keseluruhan sistem yang mendukung pengelolaan

data keuangan, mulai dari pencatatan hingga pelaporan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akurasi, serta akuntabilitas dalam setiap proses keuangan organisasi, termasuk di perguruan tinggi.

2.1.7.2 Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Pemanfaatan TI tidak hanya sebatas alat bantu administratif, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin transparansi, akurasi, dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas keuangan organisasi. Peran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akurasi Data Keuangan

Teknologi informasi memungkinkan pencatatan dan pemrosesan data keuangan dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manual. Romney dan Steinbart (2018) menekankan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis TI menghasilkan laporan yang lebih akurat dan relevan, karena setiap transaksi diproses sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

2. Meningkatkan Efisiensi Proses Keuangan

Dengan dukungan teknologi, proses keuangan yang sebelumnya memerlukan waktu lama dapat dilakukan secara lebih cepat. Menurut Laudon dan Laudon (2020), teknologi informasi membantu organisasi dalam mempercepat aliran informasi, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan produktivitas pegawai. Dalam konteks keuangan, hal ini tercermin pada percepatan penyusunan laporan, otomatisasi perhitungan, serta integrasi antar unit kerja.

3. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas

Teknologi informasi memungkinkan setiap transaksi keuangan tercatat secara real time dan dapat ditelusuri. Bodnar dan Hopwood (2013) menjelaskan bahwa sistem informasi berbasis TI menciptakan jejak

audit (*audit trail*) yang memudahkan proses pengawasan. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi meningkatkan akuntabilitas organisasi karena semua pihak dapat memantau penggunaan anggaran secara terbuka.

4. Mengurangi Risiko Kecurangan dan Penyalahgunaan

Sistem keuangan berbasis TI dilengkapi dengan kontrol internal seperti otorisasi, autentikasi, dan pembatasan akses. Hal ini mengurangi risiko manipulasi data serta penyalahgunaan anggaran. Romney dan Steinbart (2018) menegaskan bahwa pengendalian berbasis teknologi memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap ancaman kecurangan maupun kesalahan yang disengaja.

Dengan demikian, peran teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan sangat krusial, terutama dalam memastikan bahwa proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan tuntutan tata kelola yang baik dalam institusi publik maupun perguruan tinggi.

2.1.7.3 Manfaat TI dalam Pengelolaan Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen keuangan memberikan berbagai manfaat strategis bagi organisasi, terutama dalam hal peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga pada pengambilan keputusan serta penguatan tata kelola keuangan secara menyeluruh. Beberapa manfaat utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kecepatan Akses dan Pengolahan Data

Teknologi informasi memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dilakukan dengan lebih cepat. Laudon dan Laudon (2020) menjelaskan bahwa sistem berbasis TI mampu menyediakan informasi keuangan secara real time, sehingga

memudahkan manajemen dalam memantau kondisi keuangan organisasi dan mengambil keputusan dengan segera.

2. Meminimalkan Kesalahan dalam Pengelolaan Keuangan

Otomatisasi sistem keuangan berbasis TI mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manual, baik dalam pencatatan maupun perhitungan. Romney dan Steinbart (2018) menekankan bahwa sistem informasi akuntansi modern dirancang untuk mendeteksi inkonsistensi data, sehingga dapat memperkecil risiko kesalahan dan meningkatkan keandalan laporan keuangan.

3. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan adanya integrasi sistem keuangan berbasis teknologi, organisasi dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Bodnar dan Hopwood (2013) menyebutkan bahwa teknologi informasi membantu mengurangi redundansi proses, mempercepat siklus kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

4. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Teknologi informasi menyediakan mekanisme pelaporan yang lebih terbuka dan mudah diakses, sehingga mendorong terciptanya transparansi. Sistem ini juga memudahkan proses audit karena seluruh transaksi terdokumentasi dengan jelas. Hal ini meningkatkan akuntabilitas organisasi dalam mengelola dana publik (Romney & Steinbart, 2018).

5. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Data keuangan yang akurat, relevan, dan tersedia tepat waktu membantu manajemen dalam melakukan analisis keuangan serta merumuskan kebijakan. Laudon dan Laudon (2020) menegaskan bahwa informasi berbasis TI memberikan keunggulan kompetitif karena memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*).

Secara keseluruhan, manfaat teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan tidak hanya terbatas pada aspek operasional, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Hal ini menjadikan TI sebagai salah satu faktor kunci dalam menciptakan sistem keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel, khususnya di lembaga pendidikan tinggi.

2.1.8 Konsep Efisiensi Pengelolaan Keuangan

2.1.8.1 Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Efisiensi pada dasarnya menggambarkan hubungan antara input dan output, yaitu sejauh mana sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan hasil yang maksimal. Menurut Mardiasmo (2018), efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan (*input*) berupa biaya, tenaga, maupun waktu dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam suatu kegiatan. Semakin kecil jumlah input yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya.

Dalam konteks organisasi publik, Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa efisiensi tidak hanya diukur dari seberapa hemat sumber daya yang digunakan, tetapi juga dari sejauh mana penggunaannya mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Efisiensi dengan demikian berfokus pada penggunaan sumber daya secara ekonomis tanpa mengurangi kualitas layanan atau hasil yang diperoleh.

Efisiensi juga dapat dikaitkan dengan efektivitas penggunaan sumber daya. Menurut Hansen & Mowen (2015), efisiensi tercapai ketika organisasi mampu menghasilkan output yang diinginkan dengan biaya seminimal mungkin, serta menghindari terjadinya pemborosan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan efektivitas, karena penggunaan sumber daya yang efisien harus tetap menghasilkan output yang sesuai dengan sasaran organisasi. Dalam pengelolaan keuangan, efisiensi berarti kemampuan organisasi

dalam menggunakan anggaran, tenaga kerja, serta teknologi untuk menghasilkan laporan dan pelayanan keuangan yang akurat, tepat waktu, serta bermanfaat. Dengan kata lain, efisiensi dalam pengelolaan keuangan menekankan pada keseimbangan antara penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

2.1.8.2 Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara/Perguruan Tinggi

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara maupun perguruan tinggi, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Secara umum, terdapat tiga prinsip utama, yaitu:

1. Tepat Guna

Prinsip tepat guna menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Halim, (2016), pengeluaran negara atau perguruan tinggi harus sejalan dengan sasaran program dan kegiatan, sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang menyimpang dari rencana. Dengan demikian, anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

2. Hemat

Prinsip hemat menuntut agar pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien dengan menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu. Mahmudi (2019) menekankan bahwa efisiensi dapat dicapai melalui perencanaan yang realistis, pengendalian internal yang ketat, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalkan risiko inefisiensi. Hemat tidak berarti mengurangi kualitas, melainkan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin dengan biaya minimal.

3. Bermanfaat

Prinsip bermanfaat menggarisbawahi bahwa dana yang dikelola harus memberikan nilai tambah baik bagi organisasi maupun masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018), setiap rupiah yang dibelanjakan seharusnya membawa dampak positif, misalnya meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Dengan kata lain, anggaran yang dikelola tidak hanya habis digunakan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan organisasi.

Dengan berpegang pada ketiga prinsip tersebut, pengelolaan keuangan di perguruan tinggi tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas, efisiensi, dan kebermanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingan.

2.1.8.3 Indikator Efisiensi dan Prinsip Pengelolaan Keuangan

Untuk memastikan pengelolaan keuangan di perguruan tinggi berjalan sesuai prinsip tepat guna, hemat, dan bermanfaat, diperlukan indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur. Indikator ini berfungsi menilai sejauh mana anggaran telah dikelola secara efisien dan sesuai dengan standar akuntabilitas publik. Adapun indikator yang dimaksud antara lain:

- a. *Rasio Input-Output*, indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sumber daya (*input*) yang digunakan mampu menghasilkan keluaran (*output*) yang sepadan atau lebih besar. Efisiensi tercapai jika jumlah input yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan output yang dihasilkan (Mahmudi, 2019).
- b. Tingkat Kesesuaian Anggaran dengan Rencana (*Budget Conformity*), efisiensi dapat dilihat dari seberapa besar kesesuaian realisasi anggaran dengan perencanaan awal. Apabila pelaksanaan anggaran

sesuai dengan rencana dan tidak menimbulkan pemborosan, maka prinsip tepat guna dapat dikatakan tercapai (Halim, 2016).

- c. Kualitas Layanan dan Dampak (*Service Quality and Impact*), indikator ini menilai apakah penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata, misalnya peningkatan kualitas layanan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Hal ini menjadi refleksi dari prinsip bermanfaat dalam pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2018).
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, adanya sistem pengendalian internal yang baik membantu mengurangi risiko pemborosan, kecurangan, dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Efisiensi baru dapat tercapai jika pengendalian internal berjalan optimal sehingga pengeluaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Hansen & Mowen, 2015).
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan juga menjadi indikator efisiensi, karena dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi laporan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas (Mahmudi, 2019).

Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangannya tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan akademik dan non-akademik secara berkelanjutan.

2.1.9 Konsep Kebijakan sebagai Variabel Moderasi

2.1.9.1 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu keputusan formal yang diambil oleh otoritas tertentu untuk mengatur arah, strategi, dan tindakan organisasi dalam mencapai tujuan. Menurut Anderson (2014), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok aktor, baik pemerintah maupun organisasi, dalam menghadapi suatu masalah. Definisi ini menekankan

bahwa kebijakan tidak sekadar berupa keputusan, tetapi juga mencakup rangkaian langkah yang sistematis.

Dye (2013) mendefinisikan kebijakan sebagai “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Artinya, kebijakan mencakup keputusan formal baik berupa tindakan nyata maupun keputusan untuk tidak melakukan sesuatu, selama hal itu merupakan bagian dari strategi organisasi dalam mengelola sumber daya.

Dalam konteks kelembagaan pendidikan tinggi, kebijakan dapat dipahami sebagai keputusan formal yang dirumuskan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk mengatur arah pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Nugroho (2017), kebijakan juga mencerminkan pilihan-pilihan strategis organisasi yang diambil melalui proses analisis, negosiasi, dan kompromi, sehingga mampu mengarahkan perilaku seluruh anggota organisasi.

Dengan demikian, kebijakan bukan sekadar instruksi administratif, melainkan suatu instrumen strategis yang menentukan pola tindakan organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas, efisiensi, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.9.2 Peran Kebijakan sebagai Variabel Moderasi

Kebijakan pengelolaan keuangan di perguruan tinggi dibentuk untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi. Kebijakan tersebut biasanya diturunkan dari regulasi pemerintah, kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui aturan internal perguruan tinggi, hingga ke pedoman teknis operasional. Adapun bentuk kebijakan tersebut antara lain:

1) Aturan Pemerintah

Pemerintah melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah menetapkan dasar hukum pengelolaan keuangan negara yang berlaku bagi seluruh instansi, termasuk perguruan tinggi. Misalnya, Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana pendidikan. Aturan ini menjadi landasan normatif yang wajib dipatuhi oleh setiap perguruan tinggi dalam mengelola sumber daya keuangan.

2) Peraturan Rektor

Setiap perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Negeri, biasanya menetapkan peraturan rektor sebagai instrumen formal untuk mengatur lebih detail mekanisme pengelolaan keuangan di lingkungan kampus. Peraturan ini dapat mencakup tata cara penyusunan anggaran, mekanisme pencairan dana, sistem pertanggungjawaban, serta pengendalian internal. Dengan adanya peraturan rektor, pengelolaan keuangan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan spesifik perguruan tinggi.

3) Pedoman Teknis

Pedoman teknis merupakan turunan dari peraturan rektor yang berfungsi sebagai panduan operasional bagi unit kerja dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran. Pedoman ini biasanya berisi prosedur teknis mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pencairan dana, hingga pelaporan keuangan. Menurut Mardiasmo (2018), pedoman teknis berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan karena memberikan batasan yang jelas dalam setiap proses administrasi keuangan.

Dengan adanya kebijakan pada tiga level tersebut aturan pemerintah, peraturan rektor, dan pedoman teknis pengelolaan keuangan di perguruan tinggi dapat berjalan lebih konsisten, transparan, serta mendukung tercapainya tujuan akademik maupun administratif secara efisien.

2.1.9.3 Peran Kebijakan sebagai Variabel Moderasi

Dalam kerangka penelitian ini, kebijakan ditempatkan sebagai variabel moderasi yang berfungsi memengaruhi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap efisiensi pengelolaan keuangan. Peran kebijakan sebagai moderator dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Memperkuat Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Efisiensi

Kebijakan yang jelas dan terstruktur, seperti pedoman teknis atau aturan rektor, dapat memperkuat kontribusi kompetensi SDM dalam mengelola keuangan. SDM yang kompeten akan bekerja lebih efektif apabila didukung oleh kebijakan yang memberikan arahan, standar prosedur, serta ruang gerak yang terukur (Anderson, 2014). Dengan demikian, kebijakan berfungsi sebagai katalisator yang memastikan kompetensi individu benar-benar memberikan dampak nyata pada peningkatan efisiensi.

2. Memperkuat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Efisiensi

Kebijakan juga dapat memperkuat pemanfaatan teknologi informasi melalui aturan wajib penggunaan sistem keuangan berbasis elektronik, standar keamanan data, maupun mekanisme integrasi sistem. Menurut Nugroho (2017), kebijakan yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi akan mendorong efisiensi proses administrasi, transparansi laporan, serta percepatan pengambilan keputusan. Tanpa adanya kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi, potensi efisiensi dari sistem digital tidak akan optimal.

3. Memperlemah Pengaruh Jika Tidak Selaras

Sebaliknya, kebijakan yang terlalu birokratis, tidak adaptif, atau tidak selaras dengan kebutuhan organisasi justru dapat melemahkan

pengaruh kompetensi SDM maupun teknologi informasi. Misalnya, aturan yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi SDM, sementara kebijakan yang lamban dalam merespons perkembangan teknologi dapat mengurangi efektivitas penggunaan sistem informasi.

Dengan demikian, kebijakan sebagai variabel moderasi memiliki peran strategis dalam menentukan apakah kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi mampu menghasilkan efisiensi yang optimal dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Kebijakan yang tepat dapat menjadi penguat, sedangkan kebijakan yang tidak relevan berpotensi menjadi faktor penghambat.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah SDM dan teknologi terhadap efisiensi pengelolaan keuangan di moderasi oleh kebijakan, dan beberapa penelitian lain yang masih memiliki kaitan dengan variabel dalam penelitian ini

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian Dan Manfaat Penelitian
1.	Hardyansyah (2016)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada SKPD)	Regresi linear berganda dengan pendekatan nilai selisih mutlak untuk uji moderasi	Hasil Penelitian: • Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. • Sistem pengendalian intern tidak memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. • Sistem pengendalian intern

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian Dan Manfaat Penelitian
		Kabupaten Polewali Mandar)		mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Manfaat Penelitian: Memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi
2.	Durotul Khumairoh, Nafi' Inayati Zahro, Dennyca Hendriyanto N (2024)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kudus)	Analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis)	Hasil Penelitian: • Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. • Sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, dan kapasitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan. • Sistem pengendalian

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian Dan Manfaat Penelitian
				internal mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Manfaat Penelitian: Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui peningkatan penerapan sistem akuntansi, kompetensi aparatur, dan pemanfaatan teknologi informasi.
3.	Sherly Nauli (2024)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kota Bekasi)	SmartPLS (Partial Least Squares)	Hasil Penelitian: • Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. • Pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. • Pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Manfaat Penelitian:

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian Dan Manfaat Penelitian
				Memberikan insight bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi
4.	Nadia Syarifatun (2023)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan	Analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis)	Hasil Penelitian: • Kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. • Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. • Sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian Dan Manfaat Penelitian
				Manfaat Penelitian: Memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat
5.	Depianti Nursin, Syamsuddin, Nirwana (2021)	pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi	Analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis)	Hasil Penelitian: • Kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa. • Kecerdasan spiritual memoderasi pengaruh kualitas SDM terhadap pengelolaan keuangan dana desa. • Kecerdasan spiritual tidak memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian Dan Manfaat Penelitian
				Manfaat Penelitian: Memberikan wawasan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa melalui peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern